

EDISI : Rabu, 11 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 11 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Mediasi Puri Buleleng vs Dishub Buleleng Deadlock	Dengan adanya hal tersebut pihak Puri Gede Buleleng melakukan penyevelan yang di lakukan di pintu masuk Dishub naik yang ada di sebelah timur pintu masuk dan sebelah barat pintu masuk menuju Puri Buleleng yang juga dimanfaatkan sebagai pintu masuk menuju Dinas Kebudayaan Buleleng. Namun sayang mediasi yang seharusnya yang mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut malah deadlock alias tidak menemukan penyelesaian.	
		16 September Pimpinan Dewa Buleleng Dilantik	Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Wayan Koster Nomor 1960/01-A/HK/2019 tentang persminan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng Masa Jabatan 2019-2024 telah diterima seketariat dewan. Merunjuk pada SK tersebut, pelantikan pimpinan DPRD kabupaten Buleleng sementara Gede Supriatna saat dikonfirmasi, membenarkan soal pelantikan terebut. Setelah turunnya SK Gubernur Bali tertanggal 6 september 2019 lalu, maka dalam hal ini kami telah mencari hari baik dalam melakukan pelantikan para pimpinan dewan yang telah diusulkan dan telah disetujui berdasarkan SK Gubernur Bali Wayan Koster pada 16 september 2019 mendatang oleh ketua pengadilan negeri singaraja wayan sukanila SH,MH, katanya.	
		Buleleng Targetkan Masuk Kota klasifikasi II	Kota singaraja ditargetkan masuk menjadi kota klasifikasi II pada penilaian Adipura tahun 2020 mendatang. Target tersebut dianggap	

			<p>realistis mengingat saat ini di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), salah satunya Buleleng sudah memiliki Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam menangani sampah.</p>	
		<p>Futsal Tuan Rumah Ditindas Buleleng</p>	<p>TIM Futsal Kabupaten Buleleng dalam Porprov Bali yang digelar di kabupaten Tabanan yang dilangsungkan di GOR Debes tabanan, Selasa (10/9) kemarin pagi dimana tim Kabupaten Buleleng berhasil menindas tim tuan rumah dalam pertandingan futsal dengan skor 10-3 (7-2). Dalam pertandingan tersebut dimana tim Buleleng sudah unggul sejak paro babak pertama.</p>	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Lahan

Mediasi Saling Klaim Lahan Keluarga Puri Agung Tuntut Disbud Buat Tempat Parkir Baru

Singaraja (Bali Post) - Menyusul saling klaim kepemilikan lahan antara

Puri Kanginan Buleleng dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) berbuntut penutupan



Bali Post/kmb38

MEDIASI GAGAL - Mediasi penyelesaian polemik saling klaim lahan antara Puri Kanginan dengan Disbud Buleleng, Selasa (10/9) kemarin, gagal menghasilkan keputusan.

jalan di areal Disbud, Selasa (10/9) kemarin. Selanjutnya, dilakukan mediasi di kantor Camat Buleleng. Sayangnya, mediasi yang menghadirkan Panglinsir Puri Kanginan dengan Disbud belum berhasil mengambil keputusan untuk menyelesaikan polemik tersebut. Dari Panglinsir Puri Kanginan diwakili A.A. Ngurah Parwata Panji. Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) mengutus Sekretarisnya I Made Sudiarba. Mediasi itu dipimpin Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktavia Askara dan Kapolsek Kota Singaraja AKP I Gusti Ngurah Yudistira.

Parwata Panji dalam kesempatan itu keberatan jalan menuju Puri Kelasa di sebelah selatan Museum Bule-

leng itu digunakan untuk parkir kendaraan bermotor. Sehingga pihak puri tidak bisa memanfaatkan jalan itu sebagai akses keluar masuk. Untuk itu, pihaknya menuntut agar Disbud memindahkan parkir kendaraan itu ke lokasi yang baru.

Selain itu, Parwata Panji meminta, setelah mediasi ini agar dilakukan pertemuan lanjutan. Dia menunggu kehadiran Kepala Disbud Gede Komang, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Gede Sugiarta Widiada, dan Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian polemik itu. Terkait pembukaan jalan yang telanjur ditutup spanduk

itu, Parwata Panji mengatakan blokir akan dibuka setelah kesepakatan tertulis dicapai. Selain itu, pihaknya akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan A.A. Gde Djelantik yang notabene memegang hak atas Puri Kelasan.

Sekretaris Disbud I Made Sudiarba menyatakan, hasil pertemuan akan disampaikan kepada pimpinannya. Permintaan untuk tidak parkir di lahan yang diklaim milik puri itu, kemudian pihak Disbud memutuskan pemindahan parkir kendaraan itu. "Mulai hari ini, tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sana, baik dari pegawai maupun pengunjung. Kami mohon agar plang yang dipasang itu bisa segera dibuka, sehingga la-

dan mengganggu aktivitas kantor," katanya.

Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktavia Askara mengatakan, mediasi hampir mencapai kesepakatan. Hanya, penutupan jalan itu tidak akan dibongkar dalam waktu dekat ini. Rencananya Jumat (13/9) mendatang, pihaknya kembali melakukan mediasi, dengan menghadirkan para pihak terkait. Diharapkan, saat itu sudah ada kesepakatan tertulis, sehingga permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan.

"Pihak puri masih ada rembuk keluarga terkait penutupan jalan itu. Mudah-mudahan nanti akses jalan itu bisa baik kembali, sehingga bisa dimanfaatkan untuk umum," jelasnya.

Polemik saling klaim la-

han antara Puri Kanginan dengan Disbud Buleleng berlangsung sejak Maret 2019 lalu. Jalan di areal kantor Disbud itu ditutup Puri Kanginan karena tanah itu adalah hak milik puri yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 039 tahun 2002 atas nama Anak Agung Gde Djelantik.

Penutupan itu pun karena selama ini, jalan keluar masuk puri itu terganggu karena dijadikan parkir kendaraan baik pegawai di Disbud maupun pengunjung ke Gedong Kirtya dan Museum Buleleng. Mengapa Disbud menggunakan sebagai tempat parkir kendaraan jalan itu, karena tanah tersebut sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 4 tahun 2009. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Lelang

Sebelas Perusahaan Ikuti Lelang Konstruksi Revitalisasi Pasar Banyuasri

Tender proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Kecamatan Buleleng mulai berjalan. Tender proyek prestisius di Bali Utara itu ternyata laku keras. Terbukti, baru sehari Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng membuka lelang, sudah ada sebelas perusahaan yang tertarik ikut tender proyek dengan pagu anggaran Rp 180 miliar. Banyaknya perusahaan yang berminat mengikuti tender ini membuat BLP optimis pada pertengahan November 2019, sudah ditetapkan pemenang tender dan dilanjutkan penandatanganan kontrak pekerjaan. Lalu, bagaimanakah persyaratan tender itu ditekankan kepada pemenang, agar target penyelesaian proyek selama 14 bulan tidak menemui permasalahan yang berarti?

KEPALA BLP Buleleng Putu Adiptha Eka Putra di ruang kerjanya Selasa (10/9) kemarin mengatakan, setelah dinyatakan final, dokumen lelang mulai diumumkan sejak Senin (9/9) lalu. Sehari setelah diumumkan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ternyata tender ini telah ditunggu-tunggu perusahaan konstruksi di dalam negeri. BLP mencatat

ada sebelas perusahaan di tanah air ini baik swasta murni dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah *download* dokumen tender yang diumumkan pemerintah itu. Melihat perkembangan positif dalam tahapan tender ini, Adiptha semakin yakin kalau dalam waktu satu setengah bulan ini, pemerintah akan mendapatkan satu perusahaan sebagai pemenang

tender. Dari perkembangan yang berarti itu maka semakin yakin kalau tender proyek prestisius di Bali Utara itu tidak sampai gagal tender. "Ini masih berkembang. Maka kami yakin dalam waktu yang sudah kita tentukan, sudah ada pemenangnya. Sepertinya tender ini tidak akan sampai gagal. Sehingga kami targetkan November 2019 ini sudah ada penandatanganan kontrak. Itu artinya, proyek itu mulai dikerjakan," katanya.

Menurut Adiptha, mengacu finalisasi dokumen tender oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) bersama Manajemen Konstruksi (MK), revitalisasi Pasar Banyuasri itu dirancang dengan pagu anggaran Rp 180 miliar. Pagunya memakai skema pengadaan dengan metode *tahun jamak*. Dari pagu tersebut, kemudian ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp

179.380.623.656. Nilai HPS itu difinalisasi setelah PUPR dan MK melakukan penyempurnaan dokumen dengan memerhatikan perkembangan harga dan jasa dengan perkembangan terkini.

Terkait waktu pelaksanaan, Adiptha menyebut sesuai hasil penyempurnaan dokumen tender revitalisasi pasar terbesar kedua di Bali Utara itu dikerjakan dalam batas waktu 14 bulan. Pengerjaannya dimulai tahun 2019 sampai Desember 2020 mendatang. Hanya, dalam dokumen tender waktu pelaksanaan disepakati selama 400 hari kalender. Kalau disesuaikan dengan perencanaan 14 bulan, maka efektif pelaksanaan selama 13 bulan. Meski demikian, dalam dokumen tender yang sudah diumumkan itu, BLP sudah mencantumkan poin syarat kepada rekanan agar dalam pelaksanaan nanti, bisa me-

nutupi kekurangan batas waktu pelaksanaan tersebut. Dalam tender ini, poin kewajiban rekanan untuk menutupi kekurangan itu, dengan cara melakukan pekerjaan siang malam. Rekanan wajib menambah pekerja dan mengoperasikan alat mekanisasi. Dengan mencantumkan tiga hal penting itu, maka kekurangan waktu pelaksanaan yang sudah dirancang itu dapat diatasi, sehingga batas waktu revitalisasi pun genap berlangsung dalam 14 bulan.

"Kalau dari *track record* perusahaan yang sudah *men-download* dokumen tender kita, sepertinya perusahaan ini sudah berpengalaman melakukan penambahan pekerja. Pekerjaan *double shift* dan melakukan mekanisasi, sehingga jika kekurangan waktu yang ada akan bisa dipenuhi," jelasnya. (mud)



PASAR SEMIMODERN - Pasar Banyuasri, Kecamatan Buleleng telah dikosongkan. Pasar yang lama ini tidak lama lagi dibongkar. Setelah itu, dibangun pasar semi-modern pertama di Bali Utara.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Korupsi

Dugaan Korupsi KKPE

Dana "Subsidi Bunga" Buat Modal Bisnis Buah

Singaraja (Bali Post) -

Penyidikan dugaan kasus korupsi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali telah memasuki tahap P-21. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreksrim Polres Buleleng telah merampungkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari penyidikan terungkap, oknum pengurus Kelompok Tani Ternak (Poktan) NW asal Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan memakai dana subsidi bunga itu dari pemerintah yang seharusnya diterima anggota 23 orang penerima KKPE, tetapi dipakai modal bisnis buah. Lantaran bisnis buahnya bangkrut, dia tidak bisa mengembalikan dana subsidi bunga KKPE itu.

Kasat Reskrim AKP Vicky Tri Haryanto mengatakan Selasa (10/9) kemarin, setelah pihaknya melakukan penyelidikan, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, kasus tipikor yang diduga dilakukan oknum NW telah memenuhi unsur-unsur. Sesuai petunjuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng dinyatakan BAP dugaan kasus ini sudah lengkap alias P-21.

"Surat yang kita terima dari Kejari, BAP-nya sudah P-21, sehingga kami melakukan pemeriksaan tahap kedua," katanya didampingi Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK.

Sesuai BAP yang disusun

kata Tri Haryanto, modus operandi yang dilakukan oknum NW itu diduga sengaja memakai dana subsidi bunga KKPE itu. Perbuatan seperti itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini diupayakan setelah para anggota poktan di desanya itu tidak mengetahui kalau pemerintah memberikan subsidi bunga kepada pengguna kredit program perbankan. Atas perbuatan yang dilakukan itu, oknum NW diduga melanggar Pasal 2 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan ancaman minimal 5 tahun

penjara ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. "Motifnya memperaya diri sendiri, dengan memanfaatkan ketidaktahuan para anggota di kelompok bersangkutan. Karena anggotanya tidak tahu dapat subsidi, kemudian yang bersangkutan memakai dana itu untuk usahanya sendiri," jelasnya.

Meskipun memenuhi unsur melawan hukum, penyidik tidak melakukan penahanan. Alasannya karena selama melakukan penyelidikan, oknum NW itu kooperatif, sehingga tidak menghambat penyidikan. Namun, kalau setelah BAP dilimpahkan ke Kejari, bisa saja akan dilakukan penahanan. Ini tergantung dari perkembangan

di lapangan dan tergantung kewenangan Kejari itu. "Selama kita menyidik dugaan kasus ini, dia (oknum NW) kooperatif. Kita tidak tahu nanti setelah di Kejari apakah ditahan atau tidak itu tergantung Kejari," jelasnya.

Sementara oknum pengurus poktan NW mengakui kalau dana subsidi bunga KKPE BPD itu digunakan sendiri. Awalnya, dana subsidi bunga itu hanya dipinjam sementara. Dana itu dipinjam untuk modal bisnis jual beli buah. Setelah subsidi bunga itu digunakan untuk modal, ternyata usahanya bangkrut. Sehingga dia mengalami kerugian. Karena merugi dalam menjalankan bisnis buah itu, dana subsidi bunga itu belum dilunasi sampai kasusnya diselidiki penyidik. "Dengan dana itu, saya pakai modal majeg (ijon-red) mangga. Namun, saya mengalami kerugian sampai modal itu tidak kembali, sehingga tidak bisa saya mengembalikan dana subsidi bunga itu," tuturnya.

Di sisi lain, oknum NW mengaku tidak tahu dana subsidi bunga itu tidak bisa digunakan sebagai modal usaha. Selain untuk penggemukan sapi sesuai standar operasional prosedur (SOP) adalah penyaluran KKPE dan BPBD. Untuk itu, pihaknya siap menjalani proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi KKPE itu terungkap dari hasil penyelidikan kepolisian di Bali Utara. Dalam kasus ini, polisi menemukan potensi kerugian negara Rp 122 juta. Oknum NW diduga menggunakan dana subsidi bunga dari pemerintah 24 persen per tahun. Selain itu, oknum NW memotong plafon KKPE BPD sebesar 2,5 persen per tahun untuk administrasi kelompok.

Sedangkan faktanya, BPD sebagai penyalur kredit program tersebut mengenakan bunga 5,75 persen setiap tahun. Untuk meringankan biaya bunga itu, pemerintah yang memberi subsidi. Selain itu, sesuai SOP penyaluran kredit itu, BPD membebaskan biaya administrasi dalam penyaluran KKPE. (kmb38)

Sub Bagian Dokumen
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Wisuda*

Stikes Buleleng Wisuda 254 Lulusan Sundayana Jamin 90 Persen Diserap di Pasar Kerja

SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Buleleng tahun 2019 ini menamatkan 254 mahasiswa. Ratusan lulusan dan alumni sekolah yang berkembang di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan itu berasal dari beberapa kabupaten di Bali. Ada lulusan yang mengantongi keahlian bidang, perawat, dan profesi ners. Mereka itu dipastikan terserap di pasar kerja. Kalau ada alumni yang tidak bekerja, lembaga ini tidak lepas tangan. Caranya lembaga pendidikan tinggi ini memfasilitasi lulusannya dengan menyalurkan lulusan tidak saja agar dapat pekerjaan di dalam negeri namun juga hingga ke Asia Tenggara.

Wisuda yang dipusatkan di gedung Stikes Buleleng Convention Center (SBCC), Senin (9/9) lalu itu dihadiri Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG., Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPDikti) Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. dan Ketua Stikes Buleleng Dr. Ns. I Made Sundayana, S.Kep., M.Si. Lulusan yang diwisuda itu terdiri dari Program Studi (Prodi) D-3 Bidan sebanyak 27 orang, S-1 Perawat 137 orang, dan Prodi Ners sebanyak 90 orang.

Made Sundayana mengatakan, sejak lembaga yang dipimpinnnya ini dibuka angkat sumpah khusus Prodi Ners ini malah sudah memasuki tahun kelima. Sedangkan, Prodi Bidan dan Prodi Keperawatan merupakan wisuda tahun keempat. Sejak lulusan pertama sampai terakhir, pihaknya tetap pada komitmennya yakni terus menggenjot mutu pendidikan. Tidak sampai di situ saja, pihaknya terus meningkatkan kualitas tenaga pengajar (dosen), SDM yang berkompetensi sehingga dipercaya menghasilkan lulusan Stikes Buleleng siap bersaing di pasar kerja. Untuk peningkatan kualitas tenaga pengajarannya, Sundayana menyebut, kebijakan lembaganya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen untuk meningkatkan jenjang keilmuan, memberikan pelatihan, *workshop* dan seminar berskala lokal, regional, bahkan nasional.

Selain itu, dari segi kurikulum pendidikan, Stikes terus mengembangkan sayap lebih lebar dengan pembukaan



WISUDA MAHASISWA STIKES - Sebanyak 254 lulusan mahasiswa Stikes Buleleng diwisuda di gedung SBCC, Senin (9/9) lalu.

prodi baru. Saat ini, ada Prodi Farmasi (S-1) Kebidanan (S-1), dan Profesi Bidan (S-1). Untuk Kebidanan dan Profesi Bidan itu sudah menerima 80 orang mahasiswa setiap kelas. Sedangkan, Prodi Farmasi, saat ini baru menerima 47 orang angkatan pertama. "Tidak bisa dilakukan satu-satu, tetapi komitmen kami dilakukan bersama antara kualitas mahasiswa dan para dosen. Mereka kami fasilitasi agar meningkatkan jenjang keilmuannya, sehingga bisa mentransfer ilmu terbaiknya. Pada akhirnya, lulusan kami menjadi sumber daya unggul. Seperti yang digalakkan Presiden Jokowi "SDM Unggul menuju Indonesia Maju", katanya.

Terkait serapan para alumninya kata Sundayana, sampai tahun ini, 98 persen lulusan Stikes Buleleng telah diterima bekerja. Dengan capaian ini, pihaknya mengklaim, tidak ada lulusan dari sekolahnya yang menganggur. Meski demikian, pihaknya tidak berpuas diri, namun terus melakukan terobosan terbaik. Hal itu penting, agar seratus persen lulusannya diterima bekerja. Caranya, Stikes Buleleng memfasilitasi para alumni yang kebetulan belum bekerja untuk bisa bekerja ke luar negeri. Hal itu sejalan dengan jalinan kerja sama antara Stikes Buleleng dengan negara Jepang. Data terbaru, 28 lulusan Stikes Buleleng telah bekerja di Jepang. Tahun ini, jumlahnya kembali bertambah. Sebanyak 38 lulusan difasilitasi bisa bekerja di luar negeri. "Serapan lulusan kami 98 persen telah bekerja. Kami peduli dan kalau belum kerja,

lembaga memfasilitasi untuk menyalurkan agar bisa bekerja baik di dalam maupun luar negeri," jelasnya.

Kepala LLPDikti Nengah Dasi Astawa mengatakan, lulusan perguruan tinggi tidak saja siap bekerja, namun dengan bekal keilmuan selama menempuh studi itu, para lulusan bisa menciptakan pekerjaan. Dengan modal ini, maka para lulusan tidak bergantung pada kualifikasi pendidikan. Namun, menggunakan kepintaran untuk menciptakan pekerjaan untuk masa depan sendiri.

"Tidak ada orang pintar miskin. Dan tidak ada lulusan kesehatan harus bekerja di bidangnya. Namun gunakan keahlian itu untuk menciptakan pekerjaan. Dengan cara seperti itu bisa memenangkan persaingan kerja di tengah peluang kerja kecil dibandingkan angkatan kerja yang ada," katanya.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra berharap, para lulusan Stikes dapat membantu pemerintah mengatasi kekurangan tenaga di bidang kesehatan. Untuk itu, pemerintah menyambut baik dan mendukung penuh Stikes Buleleng untuk terus mencetak lulusan di bidang kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan di daerah terutama di sektor kesehatan.

"Kita sangat kekurangan tenaga kesehatan. Untuk itu, para lulusan Stikes ini sangat membantu kita. Ke depan, kami harap Stikes ini terus mencetak lulusan berkualitas, sehingga bisa berpartisipasi dalam pembangunan di daerah Buleleng," harap Wakil Bupati. (ad382)